

Strategi Pengamanan Personel dalam Menghadapi Potensi Ancaman Radikalisme Terhadap Prajurit Paspampres

Rahmat Adi Anggoro¹ Ahmad G. Dohamid² Mhd. Halkis³

Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: rahmatanggoro.ra@gmail.com¹ ahmaddohamid@gmail.com² halkis@esaunggul.ac.id³

Abstrak

Penyebaran ajaran radikalisme menjadi isu yang terus menarik diperbincangkan terlebih dengan adanya data yang menyebutkan bahwa sebesar 3% prajurit TNI terpapar paham radikalisme. Sebuah kajian dalam tulisan ini menyoroti bagaimana radikalisme dapat merambah ke lingkungan aparat Negara termasuk Paspampres melalui berbagai saluran termasuk media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengamanan personel Paspampres dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme terhadap prajurit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Paspampres memiliki resiko terpapar ideologi radikal karena faktor internal maupun eksternal. Kondisi ini semakin beresiko apabila prajurit Paspampres menggunakan keterampilan militer untuk mendukung paham radikal. Untuk itu, dibutuhkan strategi pengamanan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme di lingkungan Paspampres melalui tiga pendekatan utama yaitu preventif, edukatif, dan responsif. Pencegahan menjadi fokus utama dengan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran serta respons yang cepat terhadap situasi yang muncul.

Kata Kunci: Strategi, Pengamanan, Paspampres, Radikalisme



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Radikalisme menjadi isu strategis yang tak pernah lepas dari perhatian masyarakat baik tingkat lokal, regional, dan global. Meskipun bukan hal baru, setelah era reformasi, kelompok radikal semakin tumbuh. Banyak faktor, seperti ideologi, politik, dan sosial ekonomi, dapat menjadi pemicu radikalisme. Kelompok ini cenderung memiliki pandangan yang sangat bersemangat terhadap ideologi tertentu dan ingin mengubah nilai-nilai masyarakat. Pertumbuhan radikalisme dalam suatu negara sering kali terkait dengan masalah sosial dan kemajuan teknologi. Ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan pengabaian dapat membuat masyarakat rentan dan terpengaruh oleh doktrin radikal yang menjanjikan perubahan. Akarnya masalah radikalisme dapat ditemukan pada ketidakidealannya tatanan sosial yang seharusnya adil dan manusiawi (Safiri, 2018). Di Indonesia, perhatian terhadap potensi radikalisme dan terorisme tetap penting. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa perkembangan teknologi digital, terutama media sosial, telah menjadi wadah subur bagi penyebaran radikalisme. Komjen Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, mengungkapkan bahwa ada lebih dari 600 situs dan akun di berbagai platform media sosial pada tahun 2022 yang mengandung unsur radikalisme dan menyebarkan lebih dari 900 konten propaganda. Ruang digital semakin memberikan pengaruh besar dalam menyuarakan doktrin radikalisme kepada masyarakat (Muallifah, 2022).

Dalam konteks kehidupan keagamaan sehari-hari, radikalisme terlihat sebagai gerakan yang berusaha untuk meruntuhkan tatanan sosial dan politik secara menyeluruh dengan menggunakan tindakan kekerasan yang didasari oleh argumen atau frasa-frasa keagamaan (Hasbiyallah, 2016). Secara umum, radikalisme bisa dijelaskan sebagai pemahaman atau perilaku yang mempergunakan kekerasan untuk menanggapi perbedaan, menyelesaikan

masalah, atau mencapai tujuan tertentu. Di Indonesia, radikalisme berkembang atas berbagai motif: Pertama, motif pribadi, di mana radikalisme tumbuh karena dorongan ideologis atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kedua, propaganda politik. Ketiga, kuatnya motif religius yang mendorong terlibat dalam lingkaran radikalisme. Keempat, kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik dan demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme bisa dimaknai melalui tiga aspek: (1) pandangan atau aliran yang sangat ekstrem dalam politik; (2) pandangan atau aliran yang menginginkan perubahan atau reformasi sosial dan politik melalui cara-cara yang ekstrem atau radikal; (3) sikap yang ekstrem (Tahir, 2020).

Ancaman radikalisme bisa menasar berbagai unsur di lingkungan masyarakat tak terkecuali prajurit Paspampres. Paspampres merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Markas Besar TNI yang berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI dan melaksanakan tugas operasi pengamanan terhadap Very Very Important Person (VVIP). Paspampres mempunyai tugas pokok yaitu pengamanan pribadi Objek/VVIP, pengamanan instalasi dan fasilitas yang digunakan Objek/VVIP, pengamanan dan penyelamatan Objek/VVIP, pengamanan kegiatan Objek/VVIP, pengamanan makanan dan medis guna melindungi Objek/VVIP, pengamanan berita, serta pengawalan Objek/VVIP. Paspampres juga mempunyai fungsi organik militer yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan, intelijen, operasi, latihan, personel, logistik dan administrasi umum dalam rangka mendukung tugas Paspampres. Untuk mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Paspampres, maka perlu diadakannya peningkatan kemampuan personel Paspampres.

Paspampres merupakan unsur TNI yang memiliki tugas pokok melakukan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ancaman didefinisikan sebagai "setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa." Di tengah situasi strategis yang dinamis, spektrum ancaman juga turut mengalami perubahan. Menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terdapat dua jenis ancaman yang ada di Indonesia, yaitu ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual mencakup separatisme, terorisme, pemberontakan bersenjata, radikalisme, termasuk bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, perampokan dan pencurian sumber daya alam, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, perang siber, dan intelijen. Sementara itu, ancaman potensial adalah ancaman yang dapat diprediksi waktu terjadinya dan akan muncul di masa depan (Soufi Jayanti Ningsih, 2022).

Terkait radikalisme, ancaman radikalisme menjadi salah satu ancaman yang sangat berbahaya jika tidak diatasi, karena radikalisme adalah pintu masuk menuju aksi terorisme. Radikalisme merupakan ancaman aktual yang pada skala tertentu akan membuka peluang bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan aksi terorisme sebagai bentuk implementasi dari doktrin radikal yang dianutnya. Kelompok terorisme akan mengadopsi konsep jihad dengan berbagai tindakan teror yang menciptakan ketakutan dan kekerasan yang merugikan masyarakat Indonesia. Saat ini, pola terorisme telah berubah, tidak lagi hanya mengincar tempat ibadah, fasilitas umum, dan kerumunan, tetapi telah beralih dengan menasar pejabat negara. Contohnya adalah serangan teroris terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Menes Pandegelang, Banten yang dilakukan oleh Syahril Alamsyah atau yang juga dikenal sebagai Abu Rara (Saptohutomo, 2022). Adanya aksi terorisme yang menasar pejabat atau aparat keamanan negara timbul akibat suatu pemahaman bahwa pejabat publik termasuk anggota TNI/Polri merupakan "thaghut" atau musuh yang menghalangi niat mereka untuk menjalankan jihad. Perlawanan

dan serangan yang menggunakan senjata terhadap aparat keamanan dan fasilitas markas merupakan bagian dari perubahan dalam taktik terorisme (RI, 2015).

Pada tahun 2022, BNPT telah mengumumkan bahwa terjadi penurunan indeks ancaman radikalisme di Indonesia. Penurunan ini bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sepanjang tahun tersebut, catatan menunjukkan bahwa indeks potensi radikalisme dan terorisme berada di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMN. Indeks radikalisme dan terorisme pada tahun 2022 mencapai 51,54, sedangkan target dalam RPJMN sebesar 54,26. Menurut Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, indeks resiko terorisme pada tahun 2022 terdiri dari dua dimensi, yaitu target dan supply pelaku. Dalam penilaian ini, indeks dimensi supply pelaku berada di angka 29,48, yang lebih rendah dari target dalam RPJMN, yaitu 38,00. Evaluasi ini menunjukkan penurunan indeks ancaman terorisme. Terkait potensi ancaman radikalisme pada tahun 2022, juga mengalami penurunan sebesar 2,2% (Saptohutomo, 2022). Namun, Moeldoko, Kepala Staf Presiden, menyatakan bahwa potensi ancaman radikalisme berpotensi meningkat menjelang tahun politik 2024. Dia mengemukakan bahwa kelompok radikal mungkin akan menggunakan momentum tersebut untuk mengganggu persatuan dan kesatuan NKRI dengan mempermasalahkan isu politik identitas.

Potensi ancaman radikalisme di lingkungan TNI, khususnya Paspampres, merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan ditangani secara efektif. Meskipun Paspampres sebagai bagian dari TNI adalah institusi yang kuat dan disiplin, potensi pengaruh ideologi radikal atau ekstremis pada prajurit tetaplah ada. Meski Paspampres sebagai aparat khusus mewakili pemerintah dan didasarkan pada nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, kemungkinan prajurit terpengaruh ajaran radikal tetap ada, terutama mengingat ancaman yang sulit diprediksi saat ini. Sebagai Pasukan Pengaman Presiden, Paspampres perlu memastikan tingkat integritas yang tinggi dengan menjaga kualitas personelnya. Langkah ini melibatkan antisipasi terhadap segala bentuk gangguan atau ancaman yang dapat merusak integritas prajurit, khususnya dari potensi radikalisme. Paspampres telah melakukan berbagai program untuk menjaga integritas prajurit, seperti bimbingan mental dan rohani, fungsi komando, dan sosialisasi. Program-program ini dijalankan secara konsisten dengan beberapa metode, termasuk pemberian Santiaji secara kelompok, konseling individual, disiplin melalui latihan dan tugas, serta pembinaan mental dan rohani yang terencana dan terawasi. Langkah-langkah tersebut diambil guna menjaga kondisi mental dan ideologi prajurit Paspampres.

Meskipun demikian, langkah-langkah tersebut belum menjamin secara total bahwa ajaran radikal tidak akan masuk ke lingkungan prajurit Paspampres. Terutama pada tahun 2019, Ryamizard Ryacudu pernah menyatakan bahwa sekitar 3% prajurit TNI terpapar radikalisme dan menolak Pancasila sebagai ideologi negara (Detik.news, 2019). Fakta ini menunjukkan bahwa pengaruh ajaran radikal sangatlah signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi personal seseorang, seperti kurangnya pemahaman terhadap suatu ideologi atau bahkan kesalahpahaman terhadap ideologi tersebut. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh hal-hal di luar personal seseorang, seperti pengaruh dari media digital, lingkungan yang tidak mendukung, dan lain sebagainya (Yuliana Anggun Pertiwi, 2023). Ini menjadi perhatian bersama karena Paspampres memiliki tanggung jawab strategis. Konsistensi dalam menjaga integritas personel sangatlah penting. Oleh karena itu, Paspampres harus meningkatkan komitmennya untuk secara aktif melawan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme guna menjaga integritas dan keamanan lembaga serta masyarakat secara keseluruhan. Dari penjelasan tersebut, penelitian lebih menitikberatkan pada Strategi Pengamanan Personel dalam Menghadapi Potensi Ancaman Radikalisme Terhadap Prajurit Paspampres.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih mendalam kompleksitas potensi ancaman radikalisme terhadap Prajurit Paspampres dan strategi yang dibutuhkan dalam upaya pengamanan personel dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber literatur dan dokumentasi terkait agar peneliti memiliki sumber akurat untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam terkait fenomena ini. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi yang memadukan temuan-temuan kualitatif secara komprehensif, memberikan gambaran yang menyeluruh tentang potensi ancaman dan strategi yang diperlukan dalam menghadapi radikalisme di lingkungan Paspampres.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Ancaman Radikalisme di Lingkungan Prajurit Paspampres

Radikalisme telah menjadi isu yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Sejak abad ke-19, konsep radikalisme telah mengalami variasi dalam pemahamannya. Namun secara garis besar, radikalisme merujuk pada pandangan atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik melalui penggunaan kekerasan. Mengacu pada penjelasan Abdurrahman Mas'ud yang diuraikan oleh Rubaidi, ciri-ciri radikalisme dapat diidentifikasi sebagai berikut (Resti Wahyuni, 2022):

- a. Mengadvokasi penerapan ajaran agama secara menyeluruh dan menjadikannya sebagai landasan hukum negara.
- b. Memiliki dasar praktik keagamaan yang bersumber pada orientasi masa lalu (*salafy*).
- c. Bersikap menentang prinsip sekularisme dan modernisme.
- d. Melawan arus liberalisme dalam ranah keagamaan yang sedang berkembang.

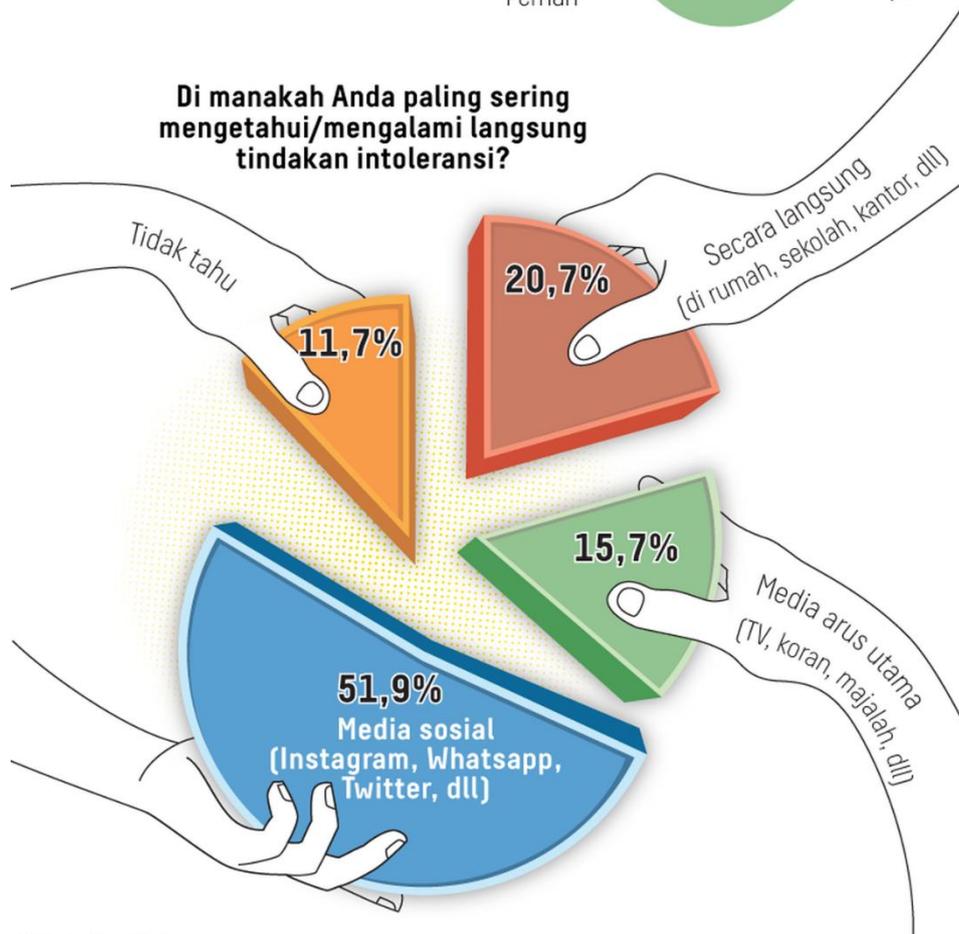
Radikalisme sebagai ancaman dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni ancaman potensial dan aktual. Radikalisme sebagai ancaman potensial mengacu pada situasi di mana ideologi atau pandangan radikal sedang berkembang, namun dampak konkretnya belum sepenuhnya terlihat atau diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengganggu stabilitas sosial atau politik. Ancaman ini mungkin tampak dari penyebaran ideologi ekstrem melalui media sosial, pendekatan perekrutan pada individu yang rentan, atau naiknya popularitas gerakan radikal tanpa adanya tindakan ekstrem yang terlihat secara langsung. Sementara radikalisme sebagai ancaman aktual merujuk pada situasi di mana ideologi atau pandangan ekstrem telah menghasilkan tindakan konkret yang mengganggu ketertiban sosial, politik, atau bahkan keamanan di suatu komunitas atau negara. Ancaman ini bisa berupa tindakan terorisme, konflik bersenjata, atau perpecahan sosial yang muncul akibat implementasi pemikiran radikal dalam tindakan nyata. Radikalisme menjadi tren ancaman yang terus berkembang. Ketidakmampuan untuk menciptakan sikap saling menerima dan menghormati perbedaan menjadi faktor krusial dalam keberadaan ancaman radikalisme di Indonesia. Situasi ini terlihat dalam hasil survei yang dilakukan oleh litbang Kompas, yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mengalami tingkat intoleransi yang cukup signifikan.

Intoleransi di Mata Publik

Pernah atau tidakkah Anda mengalami perlakuan intoleransi (karena agama, suku, ras, dll)?



Di manakah Anda paling sering mengetahui/mengalami langsung tindakan intoleransi?



Metode Penelitian

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada 17-19 Mei 2021. Sebanyak 511 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,34 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Sumber: Litbang Kompas/RFC/ERN



INFOGRAFIK: DIMAS

Gambar 1. Indeks Toleransi di Indonesia

Sumber: (Nugraheni, 2021)

Intoleransi di masyarakat, baik terkait agama, suku, ras, dan hal lainnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial serta kesejahteraan umum. Dampak utamanya adalah terjadinya marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap berbeda, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini berpotensi memicu konflik antarkelompok yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi sikap radikal. Secara umum, penyebaran ideologi radikal dapat dilakukan melalui dua pendekatan: pendekatan konvensional dan modern. Pendekatan konvensional melibatkan interaksi personal dan sosial seperti kegiatan sosial, diskusi, dan ceramah yang bertujuan untuk mempropagandakan ajaran radikal kepada target tertentu. Sementara itu, penyebaran ideologi

radikal secara modern cenderung memanfaatkan teknologi informasi, terutama media sosial, untuk melakukan propaganda secara daring. Saat ini, media sosial menjadi platform populer di kalangan masyarakat Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ajaran radikal dan membentuk jaringan tersembunyi. Kelompok radikal berusaha menjaga koneksi, bertukar ide, strategi, dan informasi melalui forum, grup online, serta kelompok kecil yang tersebar (Huda, 2017).

Faktanya, pandangan radikal tidak mengenal batasan siapa yang dapat terpengaruh. Ini juga berlaku untuk anggota militer, termasuk prajurit yang merupakan bagian dari komponen pertahanan dan keamanan negara. Prajurit, termasuk prajurit Paspampres, rentan terhadap pengaruh pandangan radikal melalui jalur yang sama seperti individu pada umumnya. Pengaruh ini bisa berasal dari lingkungan sosial mereka, ideologi yang diperjuangkan oleh beberapa kelompok tertentu, atau bahkan melalui propaganda online yang dirancang khusus untuk memengaruhi mereka. Fakta bahwa sekitar 3% anggota TNI terpapar pandangan radikal dan tidak mendukung ideologi negara, Pancasila, merupakan perhatian serius. Anggota TNI memegang peran penting dalam keamanan dan stabilitas nasional, dan ketidaksetujuan terhadap ideologi negara dapat mengancam kesatuan dan kohesi yang menjadi pondasi bangsa (Eksa, 2019). Pandangan radikal bisa menargetkan prajurit karena berbagai alasan. Ketika prajurit mengalami ketidakpuasan terhadap situasi politik, sosial, atau bahkan kondisi internal di institusi, mereka bisa menjadi rentan terhadap pengaruh ekstrem. Kurangnya pemahaman yang memadai dalam bidang agama atau politik juga dapat meningkatkan kerentanan prajurit terhadap penyebaran pandangan radikal (Khoir, 2021). Prajurit Paspampres memiliki posisi unik dalam masyarakat karena mereka memiliki akses terhadap informasi rahasia, pelatihan, dan peralatan militer yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, kesadaran yang tinggi, kewaspadaan, serta pengawasan internal yang ketat dalam institusi militer sangat penting untuk mencegah dan melindungi prajurit dari pengaruh pandangan radikal yang dapat merusak stabilitas dan keamanan internal. Paspampres merupakan unit militer khusus yang bertugas melindungi presiden beserta lingkungan sekitarnya. Menargetkan prajurit Paspampres dapat memberikan keuntungan strategis bagi kelompok radikal dengan cara berikut:

- a. Simbol kekuasaan tertinggi: Penyerangan terhadap Paspampres dianggap sebagai serangan langsung kepada simbol kekuasaan tertinggi negara. Presiden dipandang sebagai representasi otoritas negara. Dengan demikian, menyerang mereka dapat menciptakan dampak psikologis yang besar dalam masyarakat, menunjukkan kerentanan atau kelemahan dalam sistem keamanan negara.
- b. Pengaruh politik dan keamanan: Serangan terhadap Paspampres bisa mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara. Kehadiran Paspampres yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga serangan terhadap mereka dapat menciptakan kekosongan keamanan yang signifikan atau mengganggu stabilitas politik di negara tersebut.
- c. Akses terhadap informasi sensitif: Paspampres memiliki akses ke informasi rahasia, termasuk yang terkait keamanan nasional, presiden, dan lingkungan pemerintahan. Menyerang mereka dapat memberikan kelompok radikal akses ke informasi rahasia yang dapat digunakan untuk merencanakan serangan lainnya atau mengungkap kelemahan dalam sistem keamanan.
- d. Rekrutmen dan Pengaruh: Kelompok radikal mungkin melihat prajurit Paspampres sebagai target rekrutmen. Prajurit dengan akses keamanan yang tinggi dapat dijadikan sasaran untuk bergabung dengan kelompok radikal atau dipengaruhi untuk memberikan informasi rahasia atau bantuan lainnya.

- e. Pesan Politik dan Propaganda: Serangan terhadap Paspampres bisa digunakan sebagai pesan politik dan propaganda yang kuat. Kelompok radikal dapat memanfaatkan serangan tersebut untuk menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan negara atau untuk menyebarkan pesan politik yang mendukung tujuan mereka.

Potensi ancaman radikalisme di lingkungan Paspampres memiliki implikasi serius pada stabilitas internal pasukan keamanan presiden. Ancaman ini perlu dipertimbangkan, termasuk: pertama, pengaruh ideologi radikal pada anggota. Kelompok atau ideologi radikal yang merasuk ke anggota Paspampres dapat mempengaruhi pemikiran, keyakinan, dan perilaku prajurit. Ini bisa mengganggu loyalitas terhadap institusi, mengalihkan fokus dari tugas resmi, bahkan mengurangi kesiapan dalam melindungi presiden dan lembaga negara. Kedua, pemanfaatan keterampilan militer untuk tujuan ekstrem. Prajurit yang terpapar radikalisme dan memiliki keahlian militer dapat menjadi ancaman serius jika keahlian tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tugas Paspampres, menjadi potensi bahaya yang signifikan. Ketiga, rentan terhadap propaganda atau pesan ekstrem. Prajurit dengan pemahaman yang minim tentang ideologi radikal bisa menjadi rentan terhadap propaganda yang ekstrem. Pengaruh dari propaganda ini dapat mengubah pola pikir dan pandangan terhadap tindakan ekstrem, meskipun awalnya tidak memiliki paham radikal.

Terpaparnya prajurit Paspampres dengan paham radikalisme dapat berdampak signifikan dan membawa risiko besar, seperti: pertama, penurunan loyalitas terhadap institusi. Paham radikal dapat mengubah loyalitas seorang prajurit terhadap institusi militer atau keamanan, mengganggu tanggung jawab resmi yang berpotensi mengganggu keselamatan dan stabilitas institusi. Kedua, perubahan sikap dan perilaku. Radikalisme dapat merubah pola pikir, sikap, dan perilaku prajurit, mempengaruhi keterlibatan dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai institusi, bahkan menggunakan keahlian militer untuk tujuan yang tidak sesuai. Ketiga, ancaman terhadap keselamatan internal. Terpaparnya prajurit dalam ideologi radikal memungkinkan mereka terlibat dalam upaya subversif atau menjadi bagian dari jaringan yang mengancam keamanan institusi atau tokoh yang dilindungi. Keempat, kerentanan terhadap pengaruh eksternal. Kelompok radikal cenderung mengeksploitasi prajurit untuk melemahkan institusi. Kelima, pengaruh pada kesiapan operasional. Keterlibatan dalam ideologi yang bertentangan dengan tugas resmi bisa mengganggu fokus, konsentrasi, dan kesiapan dalam melindungi institusi.

Strategi Pengamanan Personel Terhadap Prajurit Paspampres dalam Menghadapi Potensi Ancaman Radikalisme

Perlindungan personel Paspampres merupakan hal krusial dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Ancaman radikalisme menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu integritas dan keselamatan anggota Paspampres, yang bertanggung jawab atas keamanan presiden dan sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman dan menerapkan strategi yang efektif untuk melindungi anggota Paspampres dari ancaman radikalisme. Melindungi personel Paspampres bukan hanya tanggung jawab lembaga itu sendiri, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga keselamatan dan stabilitas negara secara keseluruhan. Menurut teori strategi Clausewitz, terdapat tiga aspek utama dalam merumuskan strategi, yakni tujuan (*ends*), sumber daya (*means*), dan metode (*ways*) (Caliskan, 2021). Dalam konteks pengamanan personel Paspampres dalam menghadapi ancaman radikalisme di lingkungan Paspampres, pendekatan yang melibatkan teori strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, aspek *ends*. Dalam merencanakan strategi, fokus utama adalah pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, tujuan utama dalam melindungi personel Paspampres adalah memastikan integritas prajurit serta mematuhi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Upaya dilakukan untuk mencegah masuknya ancaman radikalisme ke lingkungan Paspampres guna melindungi prajurit dari pengaruh ideologi radikal. Hasratnya adalah agar strategi ini dapat memastikan bahwa anggota Paspampres memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesiapan yang tinggi untuk mempertahankan keutuhan lembaga dan menghadapi risiko radikalisme. Kedua, aspek *ways*, mengacu pada cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Dalam konteks melindungi personel Paspampres dari potensi ancaman radikalisme di lingkungan mereka, diperlukan serangkaian strategi yang terintegrasi. Ini termasuk upaya preventif, edukatif, dan responsif, yaitu:

- a. Upaya preventif, dilakukan dengan memperhatikan seleksi dan pemantauan awal calon anggota Paspampres. Ini bertujuan mencegah masuknya individu yang mungkin terpengaruh oleh paham radikal. Fokusnya adalah pada meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap moderat dalam beragama dan menolak pemahaman yang ekstrem. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terbentuknya pemikiran radikal di lingkungan Paspampres.
- b. Upaya edukatif, melalui pelatihan yang intensif tidak hanya tentang keterampilan taktis, tetapi juga membina aspek mental dan nilai-nilai etis. Tujuannya adalah membentuk prajurit yang bertanggung jawab, profesional, dan tidak terpengaruh oleh radikalisme. Disediakan juga layanan pembinaan dan konseling bagi anggota yang menunjukkan ciri-ciri terkait pemikiran radikal. Hal ini untuk membimbing mereka kembali ke jalur sesuai dengan nilai-nilai organisasi.
- c. Upaya responsif, diwujudkan melalui sistem pemantauan dan pengawasan untuk mendeteksi perubahan perilaku atau tindakan mencurigakan yang menandakan kemungkinan terlibat dalam paham radikal. Selain itu, anggota yang terindikasi terpapar paham radikal akan mendapat penanganan khusus untuk mencegah penyebaran lebih lanjut yang bisa mengancam keamanan institusi.

Ketiga, *means* terkait dengan semua sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung upaya pengamanan personel Paspampres dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme, yang meliputi:

- a. Membangun sistem intelijen yang solid untuk mengawasi kegiatan yang mencurigakan dan menganalisis data guna mendeteksi pola atau indikasi potensial rekrutmen atau terlibat dalam aktivitas radikalisme.
- b. Membangun budaya organisasi yang kuat di kalangan personel Paspampres mengenai risiko radikalisme serta pentingnya melaporkan tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Komunikasi internal yang efektif sangat vital untuk menekankan pentingnya waspada.
- c. Membangun kemitraan yang solid dengan lembaga terkait, seperti aparat keamanan, intelijen, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Kerjasama ini krusial untuk pertukaran informasi dan dukungan dalam pencegahan radikalisme.
- d. Menyiapkan protokol yang jelas dan tanggap terhadap kasus yang mencurigakan terkait radikalisme. Ini mencakup langkah-langkah tindak lanjut yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan sistem keamanan, termasuk pemeriksaan ketat, kontrol akses, dan pengawasan fisik, diterapkan dengan efektif dan konsisten untuk melindungi personel dari ancaman potensial.

- f. Menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait pencegahan radikalisme di lingkungan kerja. Ini bisa termasuk larangan pada aktivitas tertentu, persyaratan pelaporan, atau sanksi bagi individu yang terlibat dalam aktivitas radikalisme.
- g. Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi terkini serta sumber daya fisik yang mendukung usaha pencegahan radikalisme, seperti sistem keamanan elektronik, pengawasan CCTV, dan alat-alat yang memungkinkan pemantauan yang efektif.

Sebagai pasukan elit yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan negara, prajurit Paspampres harus tidak hanya memprioritaskan keselamatan presiden dan wakil presiden, tetapi juga menjaga stabilitas negara secara keseluruhan. Posisi strategis ini menuntut agar personel Paspampres terhindar dari pengaruh radikalisme. Mereka mengalami seleksi dan pelatihan intensif untuk siap menghadapi segala situasi keamanan yang berpotensi ekstrem, baik secara fisik maupun mental dalam melindungi kepala negara dan wakilnya. Tugas dan fungsi personel Paspampres diselaraskan dengan prinsip Sapta Marga, menjadi dasar moral dan kode etik bagi anggota TNI (Hermawan, 2019). Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi landasan kuat dalam menghadapi ancaman radikalisme:

- a. Kode Etik dan Kedisiplinan: Sapta Marga menekankan pada kedisiplinan, kesetiaan pada negara, dan tanggung jawab sebagai prajurit. Dalam menghadapi radikalisme, prinsip ini memastikan bahwa anggota Paspampres melaksanakan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan kebebasan dari pengaruh paham radikal.
- b. Kesetiaan pada Negara dan Pancasila: Sapta Marga mendorong kesetiaan pada negara dan ideologi Pancasila. Ini penting untuk menegaskan pentingnya mempertahankan ideologi negara dan menolak pandangan radikal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
- c. Pembinaan Mental dan Fungsi Komando: Salah satu prinsip Sapta Marga adalah "membina diri untuk menjadi prajurit yang tangguh. Penerapan prinsip ini memastikan personel Paspampres dilatih secara intensif untuk memiliki ketahanan mental dan kesiapan menghadapi ancaman, termasuk radikalisme, sehingga mereka tidak terpengaruh atau rentan terhadap ideologi ekstrem.
- d. Komitmen terhadap Kepemimpinan dan Kepatuhan: Sapta Marga menekankan penghormatan terhadap pemimpin dan kepatuhan pada perintah. Dalam menghadapi radikalisme, hal ini memastikan bahwa setiap anggota Paspampres mematuhi instruksi dan arahan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas.

Dalam upaya menangkal ancaman radikalisme di lingkungan Paspampres, personel Paspampres telah menjalani program bimbingan mental yang intensif, yang merupakan bagian dari fungsi komando untuk meningkatkan aspek mental, spiritual, ideologis, dan semangat prajurit. Bintal Fungsi Komando ini berorientasi pada Petunjuk Kasad nomor 30, yang menegaskan peran Disbintalad sebagai pusat pelaksana program TNI AD. Tujuannya adalah membentuk mentalitas sesuai dengan Sapta Marga serta meningkatkan keimanan prajurit sebagai contoh bagi lingkungannya. Pembinaan mental ideologis diharapkan dapat membentuk kesadaran akan peran sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh prinsip Pancasila, kunci kemajuan bangsa. Untuk meningkatkan strategi yang ada, strategi pengamanan personel Paspampres membutuhkan pendekatan yang holistik dalam menghadapi ancaman radikalisme. Adapun langkah-langkah yang perlu ditingkatkan meliputi: Pertama, pelatihan intensif merupakan fondasi utama dalam membangun profesionalisme dan tanggung jawab prajurit. Evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dalam mencegah radikalisme dapat menjadi pengukuran keberhasilan program. Kedua, peningkatan kesadaran terhadap moderasi beragama sebagai langkah preventif. Evaluasi akan efektivitas kesadaran moderasi dalam menghambat pemahaman ekstrem dapat membantu menilai efektivitas langkah ini

dalam mencegah radikalisme. Ketiga, pengawasan internal yang cermat menjadi kunci untuk mendeteksi perubahan sikap atau perilaku yang mencurigakan. Evaluasi terhadap efektivitas pengawasan internal dan analisis budaya organisasi dalam mencegah pengaruh negatif diperlukan untuk menilai kesiapan Paspampres dalam menghadapi ancaman radikalisme. Keempat, pendekatan kontra-radikalisasi perlu dievaluasi efektivitasnya dalam mencegah penyebaran ideologi radikal di lingkungan Paspampres. Analisis terhadap respons personel terhadap pendekatan ini bisa menjadi indikator keberhasilan. Kelima, evaluasi terhadap intensitas pembinaan saat ini perlu dilakukan, termasuk pemeriksaan selama proses rekrutmen untuk memastikan calon anggota tidak terpapar atau terkait dengan paham radikal sebelum bergabung. Keenam, peningkatan nilai-nilai yang dipegang oleh Paspampres perlu dinilai dalam konteks pencegahan radikalisme. Evaluasi terhadap kerjasama eksternal dan manfaatnya dalam memperkuat pertahanan terhadap potensi ancaman radikalisme juga penting untuk diperhatikan.

Selain itu, dalam menjaga integritas personel Paspampres, peningkatan kemampuan personel menjadi sangat penting. Kemampuan ini mengacu pada kompetensi yang menunjukkan keahlian dan keterampilan seseorang di bidang tertentu serta memberikan wewenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan batas kewenangannya. Mahmudi (2013) menjelaskan dua aspek utama dari kemampuan, yaitu kemampuan intelektual (*intelligence ability*) dan kemampuan fisik (*physical ability*). Kemampuan intelektual berkaitan aktivitas mental seperti pemikiran, analisis, dan pemecahan masalah. Sedangkan kemampuan fisik melibatkan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan sifat-sifat serupa. Kedua aspek kemampuan ini sangat vital bagi personel Paspampres dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme (Nivia Bayu Agetha, 2022). Dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme di lingkungan Paspampres, personel Paspampres tidak hanya harus memperkuat kebugaran fisik melalui latihan intensif, tetapi juga perlu dilatih secara mental untuk mengenali, menganalisis, dan menanggapi ancaman radikalisme dengan bijaksana yang dapat datang dalam berbagai bentuk dan dari berbagai arah. Dalam konteks lingkungan Paspampres yang sensitif terhadap keamanan, kombinasi optimal dari kemampuan intelektual dan fisik menjadi sangat krusial. Personel yang memiliki kedua aspek ini dapat memberikan respons yang lebih efektif dan terarah dalam menjaga keamanan presiden, wakil presiden, dan lingkungan sekitarnya dari potensi ancaman radikalisme. Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang juga menjadi krusial agar personel memahami landasan yuridis dalam penanganan ancaman radikalisme sehingga mampu mengenali, mencegah, dan menangani ancaman radikalisme sejak dini. Ini merupakan bagian dari strategi kontra radikalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan personel Paspampres dalam menjaga integritas pribadi dan institusi saat menjalankan tugas. Dengan strategi ini, personel Paspampres diharapkan lebih siap untuk melindungi diri dan institusi dari ancaman ekstremisme.

Sebagai penjaga keamanan tertinggi, anggota Paspampres juga mencerminkan kekuatan serta ketahanan negara. Keterlibatan mereka dalam aktivitas radikalisme dapat merusak citra pemerintah dan stabilitas negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga agar anggota Paspampres terhindar dari pengaruh radikalisme bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga sistem dan pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan mereka dari gangguan yang bisa mengganggu loyalitas dan keandalan mereka sebagai penjaga keamanan negara. Hal ini memerlukan kerjasama antara lembaga keamanan, intelijen, serta program pendidikan dan pemantauan yang terus-menerus. Strategi pengamanan personel

Paspampres dalam menghadapi ancaman radikalisme di lingkungan mereka memerlukan upaya kolaboratif dan integratif dari pihak-pihak terkait melalui pendekatan preventif, edukatif, dan responsif. Pendekatan preventif berfokus pada mencegah munculnya radikalisme di kalangan personel, pendekatan edukatif memperkuat pengetahuan dan kesadaran, sedangkan pendekatan responsif memungkinkan mereka untuk merespons dengan tepat terhadap situasi yang mengancam. Gabungan ketiga aspek ini menjadi pondasi penting dalam strategi pengamanan yang holistik untuk melindungi personel Paspampres dari ancaman radikalisme.

KESIMPULAN

Penyebaran ideologi radikal dalam era modern memiliki dampak yang luas dan lebih cepat menjangkau banyak audiens. Ancaman radikalisme dapat merambah ke lingkungan Paspampres, mengancam personel dengan ideologi ekstrem. Risiko ini bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal, bahkan kemampuan militer personel bisa dimanfaatkan untuk mendukung paham radikal. Potensi ancaman radikalisme ini dapat bersifat serius dan memengaruhi stabilitas internal pasukan pengamanan presiden baik secara pribadi maupun institusi. Oleh karena itu, regulasi yang ketat, pemantauan intensif, dan pendidikan yang terfokus menjadi penting untuk menghadapi penyebaran ideologi radikal yang semakin masif. Dalam hal ini, penting untuk mengadopsi strategi holistik yang mencakup pendekatan preventif, edukatif, dan responsif. Selain itu, untuk mempertahankan integritas personel Paspampres, peningkatan kapabilitas baik dalam hal intelektual maupun fisik sangatlah penting. Bersamaan dengan itu, perlu dipersiapkan strategi kontra-radikalisasi sejak dini untuk memastikan bahwa prajurit Paspampres siap menghadapi dan melindungi diri serta institusi dari ancaman radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Caliskan, M. (2021). The Nature of War and Strategic Theory. *Horizon Insights Volume 4, Issue 3*, 8-19.
- Eksa, G. (2019, Juni 21). *Cegah Prajurit Terpapar Radikalisme, BPIP Kerja Sama dengan TNI*. Diambil kembali dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/242566/cegah-prajurit-terpapar-radikalisme-bpip-kerja-sama-dengan-tni>
- Hadi, Usma (30 Juli 2019). *3% TNI Terpapar Radikalisme, Menhan: Sikapnya Tak Pancasila Lagi*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4644812/3-tni-terpapar-radikalisme-menhan-sikapnya-tak-pancasila-lagi>.
- Hasbiyallah, et.al. (2016). *Deradikalisasi Islam Indonesia; Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*. Laporan Penelitian Kelompok. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hermawan, N. (2019, Agustus 23). *Bintal Fungsi Komando, Tingkatkan Kualitas Mental Prajurit*. Diambil kembali dari <https://tniad.mil.id/bintal-fungsi-komando-tingkatkan-kualitas-mental-prajurit/>
- Khoir, A. B. (2021). Radikalisme dan Aparatur Sipil Negara: Faktor Penyebab dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 12, Nomor 2, Juni*, 145-162.
- Muallifah. (2022, Desember 31). *Recap Permasalahan Radikalisme dan Terorisme Tahun 2022: Semakin Tumbuh Subur*. Diakses dari <https://www.harakatuna.com/recap-permasalahan-radikalisme-dan-terorisme-tahun-2022-semakin-tumbuh-subur.html>

- Nivia Bayu Agetha, R. W. (2022). Manajemen Peningkatan Kemampuan Personel Pasukan Pengamanan Presiden dalam Menjaga Keamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan, Vol 8 No 1 Juni*, 108-122.
- Nugraheni, A. (2021, Juni 2). *Menelisik Tingkat Toleransi di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/06/02/menelisik-tingkat-toleransi-di-indonesia>
- Resti Wahyuni, H. L. (2022). Pemahaman Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni*, 180-188.
- RI, K. P. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- Safiri, R. B. (2018, Desember 18). *Gerakan Radikalisme Tumbuh Subur Tanpa Henti di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/gerakan-radikalisme-tumbuh-subur-tanpa-henti-di-indonesia>
- Saptohutomo, A. P. (2022, Desember 29). *Indeks Risiko Terorisme di 2022 Menurun, Masyarakat Dinilai Makin Siap Hadapi Radikalisme*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/12030041/indeks-risiko-terorisme-di-2022-menurun-masyarakat-dinilai-makin-siap-hadapi>
- Soufi Jayanti Ningsih, A. F. (2022). Kepemimpinan Strategis dalam Pertahanan Indonesia. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 1*, 88-95.
- Tahir, I. T. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume XII, Edisi 2 Desember*, 74-83.
- Yuliana Anggun Pertiwi, P. W. (2023). Pengaruh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Terhadap Perkembangan Ancaman Terorisme di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10 No. 2*, 796-802.